



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Muhammad Imam Mulyantono**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**
3. NHK : **12764**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.197.450.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/63 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.197.450.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	260.000.000
1. MOBIL, Mazda Mazda 2 Skyactiv Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOTOR, Honda Vario 110 cc Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
3. MOTOR, Vespa Super Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.783.784
F. HARTA LAINNYA	Rp.	30.000.000
Sub Total	Rp.	1.619.233.784
III. HUTANG	Rp.	253.143.016
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.366.090.768

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Desember 2019**.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.